

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan mendasar mengapa penulis mengambil judul "Dampak Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1929 Terhadap Iran", selanjutnya disingkat DK PBB. *Pertama*, DK PBB merupakan bagian dari PBB, sebagai organisasi internasional mempunyai peranan penting dalam mengorganisir hubungan antar negara agar berjalan sesuai dengan Piagam PBB yang bertujuan menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.<sup>1</sup> Akan tetapi dalam ranah pelaksanaan terkadang negara yang memiliki hak veto memaksakan kehendaknya sendiri. Sehingga demokrasi yang selalu dijadikan acuan menjadi ambigu, karena masih adanya negara dengan kekuasaan mutlak di DK PBB.

Kedua, Iran memperlihatkan dirinya sebagai negara yang memiliki *power*. Iran merupakan negara yang memiliki sejarah panjang, dulu kita kenal sebagai negara Persia. Negara para mullah ini bukanlah negara yang mudah diintervensi oleh negara lain. Revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini menjadi bukti bagaimana mereka bisa menumbangkan Presiden Reza Pahlevi yang memiliki hubungan dekat

---

<sup>1</sup> <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>, download 20 Januari 2011

dengan Negara Barat. Terbukti bahwa resolusi DK PBB yang selama ini diberlakukan kepada Iran seakan tidak memberikan efek negatif. Iran tetap saja menjadi negara berdaulat, tidak bisa diintervensi oleh kepentingan asing, terutama AS (Amerika Serikat). Kondisi ini tentu saja berbeda dengan negara-negara lain yang ketika ditekan oleh negara yang lebih kuat mereka akan tunduk dan patuh.

Ketiga, Resolusi DK PBB kali ini paling sedikit mendapat dukungan dibanding resolusi sebelumnya. Pada tahun 2006 dan 2007 anggota Dewan Keamanan PBB mempunyai suara bulat (15 suara) terhadap sanksi untuk Iran, sedangkan sanksi ketiga, hanya 14 anggota, dan yang sekarang hanya 12 anggota. Kondisi ini menjadi genting, ada kesan bahwa cara DK PBB kurang potensial dalam menangani isu nuklir Iran. Meskipun tidak semua mendukung, sanksi yang diberikan kali ini jika diterapkan sangat menyulitkan Iran ketimbang sanksi sebelumnya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dewan keamanan PBB kembali menjatuhkan resolusi berupa sanksi untuk keempat kalinya terhadap program nuklir Iran. Resolusi DK PBB untuk Iran sudah terjadi sejak pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2010. Hanya resolusi pada tahun 2008 dan 2010 dengan suara tidak bulat (15 suara) sedangkan sebelumnya dengan suara bulat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [http://waspadamedan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2319:-resolusi-1929-tak-adil-ri-muslim-terbesar-harus-berperan-&catid=57:nasional&Itemid=212](http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2319:-resolusi-1929-tak-adil-ri-muslim-terbesar-harus-berperan-&catid=57:nasional&Itemid=212), download 20 Januari 2011

Resolusi terbaru Iran diambil oleh anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu 9 Juni 2010 di New York, AS. Presiden DK PBB Croude Heller memutuskan sanksi terhadap Iran. Resolusi tersebut meliputi berbagai bidang yang mempunyai hubungan dengan program nuklir Iran. Adapun sanksi itu menyangkut sektor ekonomi, perbankan, individu, pertahanan dan lembaga-lembaga. Bila dilihat secara umum maka bisa dikategorikan dalam hal ekonomi, politik. Belum sampai disini saja, sanksi tersebut juga memperluas embargo senjata terhadap Iran.<sup>3</sup>

Dalam Resolusi DK PBB nomor 1929 hanya disepakati oleh 12 anggota dewan keamanan dari 15 negara, sedangkan 2 yaitu Turki dan Brasil memilih melawan dan satu lagi Libanon menyatakan Abstain.<sup>4</sup> China yang awal mulanya menolak resolusi, mengakui bahwa kesediaan mereka memberikan sanksi kepada Iran adalah sebagai upaya agar Iran memenuhi kewajiban di bawah NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Sedangkan Rusia menganggap persetujuan yang mereka berikan terhadap resolusi DK PBB bertujuan memberikan dorongan untuk penyelesaian program nuklir secara politik dan diplomatik.<sup>5</sup> China dan Rusia selama ini dikenal sebagai negara yang mendukung Iran dengan membangun berbagai reaktor nuklir Iran.

Turki dan Brasil berpendapat bahwa pengayaan uranium nuklir Iran memang bertujuan damai. Kepercayaan Turki bertambah ketika Iran menyetujui untuk

---

<sup>3</sup> *Kompas*, Kamis 10 Juni 2010 Dalam "DK PBB Jatuhkan Sanksi ke Iran"

<sup>4</sup> <http://www.suaramedia.com/berita-dunia/timur-tengah/23958-jengkel-iran-sebut-hukuman-pbb-qstandar-gandaq-.html>, download 23 Januari 2011

<sup>5</sup> *Kompas*, Jumat, 11 Juni 2010 Dalam "Iran Tak Akan Tunduk"

mengirim 1.200 kilogram uranium yang diperkaya level rendah ke Turki sebagai gantinya uranium yang diperkaya level tinggi bagi reaktor nuklir Iran. Kesepakatan yang dicapai oleh Turki, Brasil dan Iran ini ditanggapi dingin oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB.<sup>6</sup>

Adapun sanksi yang diterima oleh Iran adalah<sup>7</sup>;

*Pertama*, menambah embargo persenjataan dan sanksi di bidang perbankan serta melarang Iran melakukan kegiatan di luar negeri yang sensitif, seperti penambangan, produksi atau penggunaan bahan-bahan serta teknologi uranium.

Sanksi ini dianggap penting karena memang kekuatan negara salah satunya ditentukan oleh senjata yang dimiliki. Semakin banyak senjata canggih dimiliki maka akan menaikkan posisi tawar negara tersebut dalam percaturan politik dunia. Sanksi yang digalang ini menuntut Iran agar tidak bisa berbuat banyak. Segala bentuk bahan yang mengandung uranium disterilkan untuk tidak masuk ke Iran.

Ditambah lagi sanksi di bidang perbankan akan membuat arus uang masuk dan keluar akan mati. Bahkan Bank Central Iran juga mengalami hal serupa berupa pembatasan transaksi dengan bank lain, bahkan arus pengiriman dari Iran akan dikonfirmasi lebih lanjut, guna dan tujuannya. Sedangkan pengiriman uang ke Iran juga harus selektif. Kondisi ini dimaksudkan agar segala bentuk pendanaan terkait program nuklir tidak berlanjut.

<sup>6</sup> Kompas, Minggu 30 Mei 2010 Dalam "Obama, Kesepakatan Iran, Turki dan Brasil"

<sup>7</sup> [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&view=article&id=22601:cakar-hegemoni-adidaya-di-pbb&catid=16:cakrawala-indonesia&Itemid=59](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=22601:cakar-hegemoni-adidaya-di-pbb&catid=16:cakrawala-indonesia&Itemid=59), download 23 Januari 2010

Dalam bidang pertambangan pun Iran tidak mendapat porsi untuk melakukan penambangan di negara lain. Investasi industri yang berasal dari Iran akan dimatikan, kekhawatiran yang kuat terhadap kemungkinan penyalahgunaan pertambangan tersebut sebagai pemasok bahan dasar untuk melanjutkan program pengayaan uranium.

*Kedua*, meminta semua negara untuk tidak memasok, menjual atau mengirim tank-tank perang, kendaraan tempur bersenjata, sistem artileri kaliber tinggi, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, dan sistem peluru kendali kepada Iran.

Sanksi kedua ini mengarah pada pelemahan alat utama sistem senjata (alutista). Mengarahkan Iran tidak mempunyai alat perlengkapan perang. Secara sederhana bisa dikalkulasikan ketika semua yang berhubungan dengan penguatan pertahanan sudah lemah, maka melemahkan posisi Iran.

Maka arah perpolitikan Iran diharapkan akan berubah, mengarah kearah yang lebih diplomatis dan kooperatif dengan negara Barat. Sehingga alat perlengkapan Iran bisa kembali terpenuhi dengan kepercayaan yang kuat dari Negara Barat.

Selama ini Iran sangat bergantung dengan partnernya Rusia. Rusia menjadi pemasok utama senjata ke Iran. Berbagai alutista disuplai oleh Rusia semenjak hubungan kedua negara semakin solid pada awal 1990-an.

*Ketiga*, meminta negara-negara untuk tidak mentransfer atau memberikan bantuan teknologi peluru kendali balistik untuk senjata nuklir kepada Tehran.

Pemutusan transfer teknologi tentu akan membuat Iran semakin tidak bisa mengembangkan proyek uraniumnya, sehingga Iran tidak mampu memperkaya

uraniumnya ke tahap 20% sebagaimana yang diharapkan pada Februari 2010.<sup>8</sup> Penghentian bantuan teknologi tentu membuat Iran semakin sulit untuk mengembangkan program uraniumnya. Selama ini Iran masih bergantung kepada Rusia, sebagai partner utama dalam mengembangkan uranium Iran. China juga menjadi salah satu yang ikut membantu Iran untuk mendirikan berbagai reaktor nuklir Iran dan juga menjadi pemasok uranium.

Rencana Iran untuk mandiri dalam bidang listrik yang didapatkan dari reaktor Busheh akan tidak terpenuhi. Hal ini tentu berimbas pada permasalahan ekonomi. Listrik merupakan basis utama dalam menjalankan mesin, sedangkan mesin sebagian bisa berjalan karena faktor tersedianya listrik.

*Keempat*, meminta negara-negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut Iran yang diyakini mengangkut barang-barang terlarang dari Iran.

Inpeksi mendadak didekat perbatasan, atau pelabuhan negara tertentu bisa menjadi alternatif bagi setiap negara untuk mencegah penyebar luasan nuklir. Seperti yang tertuang dalam NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) yang melarang setiap negara untuk mentransfer nuklirnya ke negara lain. Hal ini sangat berkaitan dengan kemungkinan Iran menjual uraniumnya untuk mendapatkan teknologi tambahan dalam bentuk persenjataan.

Walau demikian pemeriksaan kapal Iran tentu akan menghambat suplai barang ekspor Iran. Jadwal pengiriman barang akan terganggu dan membuat konsumen merasa dirugikan, dan enggan melakukan transaksi dengan Iran.

---

<sup>8</sup> Kompas, Jumat 12 Februari 2010 Dalam "Iran Negara Nuklir"

*Kelima*, menambah 40 pihak ke dalam daftar orang atau kelompok yang dikenai sanksi finansial serta larangan bepergian, termasuk Javad Rahiqi, kepala pusat teknologi nuklir Isfahan, Iran.

Larangan bepergian terhadap empat puluh orang yang dianggap terlibat dalam program nuklir Iran. Baik sebagai donator, fasilitator atau sebagai penyedia alat untuk mengembangkan uranium. Larangan individu ini mencakup para pemilik industri dan garda revolusi Iran.

Kalau dilihat lebih jauh, maka orang-orang dan pihak yang mendapatkan larangan untuk bepergian dan melakukan transaksi perdagangan dengan negara luar adalah kunci sentral politik dan ekonomi Iran. Secara luas bisa disebut sanksi ini untuk merapuhkan kekuatan politik dan ekonomi Iran.

Sanksi diatas merupakan penguatan sanksi sebelumnya pada tahun 2008, hanya terdapat beberapa tambahan. Bisa dikatakan sanksi ini ingin mempertegas sanksi sebelumnya. Menguatkan tekanan terhadap ekonomi dan politik Iran.

Dalam peta perpolitikan, resolusi DK PBB nomor 1929 merupakan serangan dari semua bidang penting (vital) dalam memasok dan menjalankan program nuklir Iran. Dalam kata lain dijelaskan oleh Ahmadinejad sebagai Reoslusi Anti Iran.<sup>9</sup> Jika ditilik lebih dalam maka terlihat jelas salah satu tujuan utama dari resolusi Iran adalah mengisolasi Iran dari sistem internasional. Resolusi ini didasarkan pada program nuklir Iran yang sangat meresahkan Negara Barat terutama AS dan Israel. Program yang tidak bisa dikatakan oleh IAEA dengan tujuan damai. Program ini juga yang

---

<sup>9</sup> <http://www.antaraneews.com/print/1277216170>, download 24 Januari 2011

menyita perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tertuju pada klaim yang saling berlawanan antara Iran dan DK PBB. Iran selalu sesumbar bahwa program nuklirnya dengan tujuan damai, sedangkan sebagian DK PBB selalu menyatakan Iran sedang membuat senjata nuklir.

Resolusi ini diambil pada saat Iran sedang melakukan peningkatan sektor ekonomi. Sebagai salah satu pilar kemampuan sebuah bangsa, atau merupakan dasar penentuan kemampuan. Sektor ekonomi Iran bergerak secara linier dari tahun ketahun.

Resolusi DK PBB ditolak mentah-mentah oleh Ahmadinejad. Dia mengatakan "sanksi itu tidak berharga sepersen pun bagi bangsa Iran".<sup>10</sup> Bagi Iran sanksi tersebut seolah menandakan bagaimana DK PBB hanya dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Iran memang tidak pernah menerima sanksi dari DK PBB yang diberikan kepada mereka selama ini. Sebab Ahmadinejad menganggap apa yang diputuskan oleh DK PBB merupakan bentuk ketidakadilan.

Kemampuan Iran menjalankan roda perekonomiannya tidak terlepas dari kemandirian mereka dalam beberapa tahun belakangan. Iran selama ini berusaha menjadi negara maju dan makmur. Program pemerintah Iran yang pada awalnya bertumpu pada hasil minyak, akan tetapi perlahan bergerak ke sektor non migas. Terbukti Iran mampu mendapatkan pendapatan negara sebanyak 50% dari non migas. Perdagangan dengan berbagai negara menunjukkan volume yang meningkat meskipun Negara Barat berusaha mengucilkannya. Potensi kuat Iran tersebut sampai pada Mei 2010 masih membuat berbagai negara menjadikan Iran sebagai salah satu

---

<sup>10</sup> *Ibid*, <http://www.antarane.ws.com>



partner perdagangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejumlah negara tetap melakukan kegiatan bisnis, di antaranya Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, yang merupakan sekutu AS.<sup>11</sup>

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik sebuah pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut "Apa Dampak Ekonomi Politik Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 1929 Terhadap Iran?"

### **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk memahami permasalahan diatas maka penulis menggunakan teori sitem dan teori interdependensi.

#### **1. Teori Sistem**

Teori sistem ini dikembangkan oleh Ludwing Von Bertalanffy, seorang biolog.<sup>12</sup> Teori sistem memang diambil dari istilah biologi untuk menggambarkan sebuah proses yang saling berkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Teori ini kemudian dikembangkan dalam sistem politik sebagai serangkaian struktur-struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan nilai-nilai secara sah.

---

<sup>11</sup> *Kompas*, Minggu 30 Mei 2010 Dalam "Memanfaatkan Potensi Iran"

<sup>12</sup> Ludwig Von Bertalanffy, "General System Theory" *General Systems*, Year Book Of General Theory, Ann Arbor, vol, I, 1959, hal 1-10

Sistem dapat dijelaskan sebagai kerangka teoritis untuk mengumpulkan data mengenai fenomena politik, kesatuan integrasi saling berhubungan berdasarkan serangkaian hipotesa variabel politik, misalnya sistem internasional yang melibatkan pemerintah dunia, dan serangkaian hubungan diantara variabel politik dalam sebuah sistem internasional.

Teori sistem merujuk pada serangkaian pernyataan mengenai hubungan diantara variabel dependen dan independen yang diasumsikan berinteraksi satu sama lain. Artinya perubahan dalam satu atau lebih dari satu variabel bersamaan akan disusul dengan perubahan variabel lain atau kombinasi variabel.<sup>13</sup>

Analisa sistem dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi. James Rosenau mempergunakan teori sistem dalam pengertian "suatu sistem" menurut pandangannya, harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Di lain pihak Goodman membicarakan tiga hal utama dalam pemakaian sistem dalam hubungan internasional:<sup>14</sup>

a. Sistem sebagai sebuah gambaran dalam usaha mengidentifikasi interaksi antara para pelaku politik internasional dan secara perlahan mengembangkan pola-pola di luar itu.

---

<sup>13</sup> <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-sistem-dan-futurologi.html#ixzz1JMGUIHo0>, download 14 April 2011

<sup>14</sup> J.S Goodman, *The Concep of 'system' in International Relations*, Background, 8, 1965, Hal 257-268

- b. Sistem sebagai eksplanasi (penjelasan) dimana antar-hubungan di dalam sistem dipergunakan sebagai variabel analisa
- c. Sistem sebagai metode, penelitian mendalam dilakukan untuk memilih dan memproses data dalam hubungan internasional.

Teori Sistem: yaitu, suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen, sub elemen, sub sistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh. Teori sistem digunakan untuk menganalisis perilaku dan gejala sosial dengan berbagai sistem yang lebih luas maupun dengan sub sistem yang tercakup di dalamnya. Contohnya adalah interaksi antar keluarga disebut sebagai sistem, anak merupakan sub sistem dan masyarakat merupakan supra sistem, selain kaitannya secara vertikal juga dapat dilihat hubungannya secara horizontal suatu sistem dengan berbagai sistem yang sederajat.<sup>15</sup>

Jika dikembangkan maka kita lihat interaksi antar negara disebut sebagai sistem, warga negara merupakan sub sistem sedangkan DK PBB merupakan supra sistem yang merupakan kumpulan negara.

Resolusi yang diputuskan oleh DK PBB merupakan sebuah kebijakan yang menyangkut negara (Iran). Warga negara Iran sebagai sub sistem menjadi obyek yang mendapat sanksi, sanksi tersebut tentu nantinya akan berpengaruh terhadap interaksi Iran dengan negara lainya (sistem). Efek dari resolusi DK PBB akan kelihatan dari tingkat ketergantungannya dengan negara yang mempunyai hubungan dengan Iran, baik politik maupun ekonomi.

---

<sup>15</sup> <http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/06/teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott.html>, download 15 April 2011

Iran sebagai salah satu negara yang masuk dalam sistem organisasi internasional akan memperoleh dampak dari resolusi yang telah diputuskan oleh DK PBB. Keputusan ini bisa berdampak negatif terhadap ekonomi dan politik Iran. Secara kasar bisa diketahui Iran tidak akan bisa berbuat apa-apa di tengah sanksi yang diberikan DK PBB. Meskipun demikian, Iran bukanlah negara yang lemah, negara ini sudah sering mendapatkan sanksi dari negara dan DK PBB.

## 2. Teori Interdependensi (Interdependency Theory)

Dalam menjalankan tugas utama dari setiap bangsa untuk dapat mensejahterakan rakyatnya masing-masing tidak bisa dilakukan tanpa bantuan dari negara lain. Setiap negara mempunyai kelebihan dan kekeurangan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka negara melakukan transaksi ekspor-impor. Semua ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan hidup dari setiap warga negara.

Proses modernisasi bisa meningkatkan tingkat interdependensi di antara negara. Proses ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah negara industri. Mereka memperjualbelikan berbagai produk barang dan jasa. Kondisi ini kemudian penting untuk dilihat sebagai sebuah bentuk ketergantungan yang semakin kuat antara negara satu dengan negara lainnya. Apalagi bagi negara industrialis pembangunan ekonomi dan perdagangan luar negeri adalah alat-alat dalam mencapai keunggulan

dan kesejahteraan yang lebih mencukupi dan dengan sedikit biaya. Dalam pandangan David Mitrany, interdependensi yang lebih besar dalam bentuk hubungan transnasional antar negara dapat mewujudkan perdamaian.<sup>16</sup>

Jika dilihat jenisnya, maka ada dua jenis saling ketergantungan yaitu eksternal interdependencies dan internal interdependencies. Internal interdependencies adalah ketergantungan yang terjadi di dalam lingkungan internal anggota individu dalam kelompok sosial, sedangkan eksternal interdependencies adalah ketergantungan antar anggota kelompok tersebut. Meningkatnya eksternal interdependensi mengakibatkan dua keuntungan bagi aktor-aktor untuk membentuk suatu institusi internasional dan mematuhi aturan yang ditentukan oleh institusi tersebut. Pertama, dalam dunia yang saling tergantung aktor tidak akan lagi mengejar kepentingan mereka tanpa menyesuaikan diri dengan aktor yang lain. Pada saat inilah aturan institusional muncul dan berkembang sebagai sarana dari aktor-aktor untuk memperkecil interferensi bersama, dan sekaligus sebagai sarana untuk meramalkan tingkah laku pihak lain dalam sistem tersebut. Kedua, meningkatnya saling ketergantungan juga akan memperkuat kapasitas tiap anggota sistem sosial untuk membalas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Hal ini akan membuat setiap anggota negara segan untuk melakukan pelanggaran terhadap keputusan sebuah resolusi. Saling ketergantungan dalam hal internal interdependencies dapat dimaknai bahwa hal

---

<sup>16</sup> Robert Jackson & George Sorensen, *Pengantar Studi Ilmu Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar hal 149

tersebut termasuk dalam urusan domestik sebuah negara, sedangkan eksternal interdependencies berhubungan dengan urusan antar negara.

Saling ketergantungan antar negara di era globalisasi semakin erat. Negara sebagai salah satu aktor hubungan internasional mempunyai peranan sentral dalam menjalin kerjasama yang lebih menonjolkan sisi persahabatan. Walau demikian negara sebagai aktor terkadang tidak bisa menempatkan posisinya secara mandiri karena akan selalu mendapat serangan jika kebijakan politik yang dilakukan oleh seorang aktor tidak sejalan dengan aktor lainnya.

Iran yang merupakan negara pengekspor minyak dan gas tentu mendapatkan penghasilan dari penjualannya. Minyak Iran selama ini selalu disebar ke berbagai negara. Iran sebagai salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alamnya sangat membutuhkan tenaga terampil untuk bisa mengelolanya. Iran pun kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai universitas terutama dengan China.

Dilain pihak Iran juga sangat membutuhkan pasokan barang-barang berat, seperti besi dan baja, untuk kedua ini mereka sangat bergantung dengan Jepang dan China. China dan Jepang juga membutuhkan pasokan minyak dan gas dari Iran. Artinya secara ekonomi, terutama dalam bidang pertambangan hubungan Iran-China dan Iran-Jepang ada saling ketergantungan. Iran juga masih sangat membutuhkan pasokan uranium dari Rusia, sehingga hubungan kedua negara sangat menguntungkan terlebih bagi Rusia. Dalam bidang lainnya, Iran juga masih sangat membutuhkan barang-barang industri dari luar negeri.

## **E. Hipotesa**

Secara ekonomi politik terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1929 terhadap Iran adalah;

1. Perekonomian Iran mengalami stagnasi, nilai ekspor-impor Iran merosot tajam. Sehingga pemerintah melakukan pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak, meskipun negara tersebut pengekspor minyak kedua terbesar di dunia. Sistem transaksi perbankan mati, dan tingkat inflasi melonjak tajam. Kondisi tersebut membuat program pengayaan uranium di berbagai reaktor terancam gagal atau paling tidak mengalami keterlambatan untuk mencapai target sesuai dengan rencana awal.
2. Perpolitikan Iran semakin terisolasi dalam hubungan internasional. Kondisi ini membutuhkan sosok yang bisa membawa perubahan pandangan Barat terhadap Iran. Akhirnya pemecatan menteri luar negeri Iran disebut sebagai jawaban atas persoalan nuklir Iran.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini digunakan metode studi pustaka, melalui literatur yang terkait subyek yang diteliti. Penggunaan studi kepustakaan diarahkan pada pengumpulan data yang bersifat dokumenter yang tersedia dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, data elektronik (internet) yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **G. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi dengan judul "Dampak Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1929 Terhadap Iran" ini bertujuan untuk memprediksikan kondisi perekonomian dan politik Iran pasca resolusi tersebut.

### **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan di dalam hipotesa dan latar belakang masalah. Mengingat tema penulisan kali ini sangat luas ruang lingkup pembahasannya penulis akan membahas dampak dampak Resolusi DK nomor PBB 1929 terhadap nuklir Iran sampai pada akhir Desember 2010. Walaupun demikian, penulisan ini juga menggunakan data-data yang diluar kurun waktu tersebut bilamana diperlukan sebagai pembanding atau memperkuat argumen.



## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I:** Bab satu akan berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Bab ini akan membahas dinamika program nuklir Iran.

**BAB III:** Bab ini penulis akan membahas respon anggota DK PBB terhadap program nuklir Iran dan isi resolusi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.

**BAB IV:** Kondisi ekonomi politik yang ditimbulkan oleh resolusi DK PBB nomor 1929 terhadap Iran.

**BAB V:** Kesimpulan.